

DEMOKRASI PENDIDIKAN ISLAM: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA

Ayu Lestari

IAI An Nur Lampung

Email: ayulestari@an-nur.ac.id

Diterima: 09/07/2022	Revisi: 17/07/2021	Disetujui: 16/08/2022
-------------------------	-----------------------	--------------------------

ABSTRACT

Education is the most important resource vehicle in all aspects of life. The progress of a society or a nation is largely determined by its investment and ability to manage the education sector. Through education, it is hoped that educated individuals are born who are able to fight oppression and free humans from social injustices that occur because of the social transformation that is determined by the community associated with educated individuals. Islamic education conceptually has basic democratic principles that aim at the liberation of humans from all forms of adversity so that education is transformative in terms of unequal social realities. Islamic education also greatly respects and accommodates differences in a person's background regarding ethnicity, values, religion, social, culture and even differences in abilities. Thus Islamic education.

Keywords: *Democracy, Education and Islam*

ABSTRAK

Pendidikan merupakan wahana sumber daya terpenting dalam segala aspek kehidupan. Kemajuan sebuah masyarakat maupun bangsa sangat ditentukan oleh investasi dan kemampuannya mengelola bidang pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan lahir individu-individu terdidik yang mampu melawan penindasan serta membebaskan manusia dari ketidakadilan sosial yang terjadi karena adanya transformasi sosial itu ditentukan oleh masyarakat yang terkait dengan individu yang terdidik. Pendidikan Islam secara konseptual memiliki prinsip-prinsip dasar demokratis yang bertujuan pada

pembebasan manusia dari segala bentuk keterpurukan sehingga pendidikan bersifat transformatif pada realitas sosial yang timpang. Pendidikan Islam juga sangat menghargai dan mengakomodasi perbedaan latar belakang seseorang yang menyangkut etnis, nilai, agama, sosial, budaya bahkan perbedaan kemampuan. Dengan demikian pendidikan Islam.

Kata Kunci: Demokrasi, Pendidikan Dan Islam

A. PENDAHULUAN

Istilah demokrasi pada awalnya berasal dari Yunani yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersifat langsung dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini dikarenakan kondisi di Negara tersebut sangat sesuai dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak dan luas wilayah yang tidak terlalu luas. Istilah demokrasi kemudian berkembang ke seluruh dunia, bahkan hampir seluruh Negara di dunia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi karena lebih banyak menguntungkan dan suasana Negara lebih aman dan kondusif.

Seiring dengan perkembangan zaman, istilah demokrasi berkembang dipakai bukan hanya untuk bidang pemerintahan saja, melainkan ke segala bidang dalam kehidupan sosial yang salah satunya adalah ke bidang pendidikan khususnya pendidikan Islam sebagaimana yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Asal mula munculnya konsep demokrasi adalah dari pemikiran mengenai sistem pemerintahan di negara Yunani Kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum masehi sampai abad ke-6 masehi. Pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena negara Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota yang ruang

lingkupnya tidak terlalu luas dan adanya jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara.¹

Dalam dunia pendidikan juga terdapat istilah demokrasi pendidikan yang pada prinsipnya dalam menentukan proses pendidikan juga menanamkan nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi seperti nilai persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan, toleransi, kemajemukan dijadikan sebagai dasar dan landasan dalam praktik-praktik pendidikan. Maka, jika terdapat permasalahan dalam suatu lembaga pendidikan yang salah satu *stake holdernya* tidak dilibatkan sehingga merasa dirugikan maka secara otomatis akan terjadi akibat dari tidak adanya implementasi salah satu dari nilai-nilai demokrasi, dan hal ini akan berakibat pada terjadinya permasalahan dalam lembaga pendidikan tersebut yang disebabkan tidak menjalankan sistem demokrasi pendidikan.

Keberadaan demokrasi dalam pendidikan Islam, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejarah/demokrasi dalam ajaran Islam dan demokrasi secara umum. Demokrasi dalam ajaran Islam secara prinsip telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah musyawarah'. Kata demokrasi memang tidak ada terdapat di dalam Alquran dan hadits, karena kata demokrasi berasal dari Barat atau Eropa yang masuk peradaban Islam.²

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode teori dasar yang menggunakan data dari bahan-bahan yaitu bersifat kepustakaan (*library research*), dimana penulis membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan beberapa tafsir yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sedangkan sumber data sekundernya, yaitu buku-buku, jurnal dan lain-lain yang

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1981), h. 50

² Daulay, Muhammad Roihan. "Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 3.1 (2017): 91-110.

membahas mengenai permasalahan masalah yang diteliti. Langkah yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah langkah deskriptif, yaitu langkah yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal tentang permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Hakikat Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata “*demos*” dan “*cratos*”, *demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintah. Makademokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat. Menurut Dede Rosyada yang istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada di tangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substansif demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.³

Sugarda Purbakawatja, yang dikutip oleh Ramayulis memberikan definisi bahwa demokrasi pendidikan, adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil.⁴

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak dan perlakuan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan.

2. Demokrasi Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai dasar sebagai “Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara”.⁵

³ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Kencana: Jakarta, 2004), h. 35.

⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia 2015), h. 468-470

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990, h. 195

Demokrasi di samping pelaksanaan dan prinsip kesamaan sosial dan tidak adanya perbedaan yang mencolok, juga menjadi suatu cara hidup, suatu *way of life* yang menekankan nilai individu dan intelegensi serta manusia menunjukkan adanya hubungan sosial yang mencerminkan adanya saling menghormati, kerja sama, toleransi.

Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya intelegensi, kesehatan, dan keadaan sosial, dan sebagainya. Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan.⁶

Demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas, patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan mengandung tiga hal, yaitu:

a. Rasa Hormat Terhadap Harkat Sesama Manusia

Demokrasi pada prinsip ini dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan tidak memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan antara peserta didik dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati di antara mereka.

b. Setiap Manusia Memilliki Perubahan ke Arah Pikiran yang Sehat

Dari acuan prinsip inilah timbul pandangan manusia itu harus dididik, karenanya sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak atau peserta didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis dan komprehensif serta keritis sehingga anak atau peserta didik tadi memiliki wawasan, kemampuan dan kesempatan yang luas. Tentunya dalam proses seperti ini di perlukan sikap yang demokratis dan

⁶ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta:Rajawali Pers 2012), 245-246.

tidak terjadi pemaksaan pandangan terhadap orang lain. Sikap dalam pendidikan untuk mengajak setiap orang berfikir lebih sehat seperti inilah akan melahirkan warga negara yang demokratis di pemerintahan yang demokrasi.

c. Rela Berbakti untuk Kepentingan dan Kesejahteraan Bersama

Demokrasi di sini tidaklah berarti setiap orang dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain. Atau dengan kata lain bahwa seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Karenanya warga negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan kebebasan itu dengan rela hati dan juga orang lain tentunya dapat merasakan kebebasan yang didapat setiap warga negara dari suatu negara yang demokrasi yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya akan dapat tercapai apabila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Kebersamaan dan kerjasama inilah pilar penyangga demokrasi yang dengan selalu menggunakan dialog dan musyawarah sebagai pendekatan sosialnya dalam setiap me pendidikan kewarganegaraan negara dan ketatanegaraan menjadi penting dan sesuatu yang tidak bisa diabaikan keputusan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan tersebut.⁷ Dengan demikian akan diberikan kepada setiap warga negara, anak-anak atau peserta didik dalam upaya mempraktekan salah satu dari prinsip-prinsip demokrasi.

3. Demokrasi Pendidikan Islam

Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Bentuk demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

a. Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik.

Kebebasan disini meliputi: (1) Kebebasan berkarya ; (2) Kebebasan mengembangkan potensi; (3) Kebebasan berpendapat

⁷ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2013), h.163-165.

1. Kebebasan Berkarya

Menurut al-Abrasyi, mendidik harus membiasakan peserta didiknya untuk berpegang teguh pada kemampuan dirinya sendiri dan diberi kebebasan dalam berfikir tanpa terpaku pada pendapat orang lain, sehingga peserta didik bisa menentukan secara bebas masa depannya sendiri berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya.⁸

2. Kebebasan dalam Mengembangkan Potensi

Nurcholis Madjid membagi fitrah menjadi dua dimensi, *pertama, fitrah algharizah*, merupakan potensi dalam diri manusia yang dibawanya sejak lahir, meliputi akal, nafsu dan hati nurani. *Kedua, fitrah al-munazalah* adalah potensi luar yang membimbing dan mengarahkan *fitrah al-gharizah* untuk berkembang sesuai dengan fitrahnya melalui potensi pendidikan.⁹

Ajaran Islam sangat memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengembangkan nilai fitrah yang ada pada dirinya untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman.

3. Kebebasan dalam Berpendapat

Pendidik dituntut untuk menghargai pendapat peserta didik, peserta didik dituntut pula untuk menghargai pendapat pendidik dan sesama peserta didik, Karena menghargai pendapat merupakan salah satu kebutuhan dalam melaksanakan pendidikan.

Para pendidik dalam hal ini adalah membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengemukakan isi hatinya dengan cara yang wajar, bermoral dan terpuji serta diridhai oleh Allah SWT sesuai dengan tahap-tahap perkembangan jiwanya. Pendidik bukan menekankan kebebasan pendapat pada peserta didik yang mengakibatkan jiwanya terbelenggu seperti adanya rasa cemas, gelisah dan kecewa selama berlangsungnya proses belajar mengajar.

⁸ Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Beberapa Pemikiran Pendidikan, Terjemah Syamsudin Asyrofi dkk.* (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1996), h. 57

⁹ Nurcholis Madjid, *Islam ke-Moderenan dank e-Indonesiaan* (Bandung: Mizan, 1991), h. 8

b. Persamaan Terhadap Peserta didik dalam Pendidikan Islam

Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar.

Abuddin Nata menyatakan bahwa peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat, karena penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dari pendidik. Pendidik harus mengajar anak orang yang tidak mampu dengan yang mampu secara bersama atas dasar penyediaan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik.¹⁰ Dalam pendidikan Islam tidak ditemukan sistem sekolah unggul karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi pendidikan Islam sebab bersifat diskriminasi terhadap peserta didik. Dalam pendidikan Islam yang ada adalah sistem pelayanan unggul, dimana setiap peserta didik dibimbing mengembangkan potensinya secara maksimal.

Pendidik harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. Bagi peserta didik yang kurang aspiratif dalam belajar diberikan latihan-latihan remedial secara khusus. Sedangkan yang cerdas diberikan tambahan yang belum dipelajarinya.

c. Penghormatan Akan Martabat Individu dalam Pendidikan Islam

Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain, maksudnya ialah seseorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Secara historis prinsip penghormatan akan martabat individu telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam praktek pembebasan kaum tertindas di Mekkah seperti memerdekakan budak.

Dalam proses pendidikan, pendidik menghargai pendapat peserta didik, tanpa membedakan dari mana asalnya. Pendidik dapat menimbulkan sikap saling menghargai pendapat diantara sesama peserta didik. Pendidik dalam memberikan ganjaran atau hukuman kepada peserta didik harus yang bersifat mendidik,

¹⁰ Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 67

karena dengan cara yang demikian akan tercipta situasi dan kondisi yang demokratis dalam proses belajar mengajar.

4. Implementasi Demokrasi Pendidikan Islam

Meminjam prinsip hakekat pendidikan Islam yang di gunakan Hasim Amir, yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang *integralistik, humanistik, pragmatik* dan *berakar pada nudaya kuat*.¹¹ Tawaran Hasim Amir ini, yang di kutip A. Malik Fadjar, dapat digunakan sebagai konsep demokratisasi pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan masyarakat Indonesia, yaitu :¹²

a. Pendidikan *integralistik*,

Merupakan model pendidikan yang diorientasikan pada komponen-komponen kehidupan yang meliputi: pendidikan yang berorientasi pada *rabbaniyah* [ketuhanan], *insaniyah* [kemanusiaan] dan *alamiyah* [alam pada umumnya], sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan yang baik dan untuk mewujudkan *rahmatan lil 'alamin*, serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individual-sosial. Pendidikan integralistik diharapkan dapat menghasilkan manusia [peserta didik] yang memiliki integralitas tinggi, yang dapat bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, menyatu dengan dirinya sendiri sehingga tidak memiliki kepribadian belah atau kepribadian mendua, menyatu dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan disintegrasi sosial, dan dapat menyatu dengan alam sehingga tidak membuat kerusakan, tetapi menjaga, memelihara dan memberdayakan serta mengoptimalkan potensi alam sesuai kebutuhan manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber dari konsep Ketuhanan [*Teosentris*], artinya pendidikan Islam harus berkembang dan dikembangkan berdasarkan teologi tersebut.

¹¹ A. Malik Fadjar. *Reorientasi Pendidikan Islam*. (Fajar Dunia, 1999) 37

¹² Romlah, Siti. "Demokrasi Pendidikan Islam." *Jurnal Studi Islam: Pancawahana* 13.2 (2018): 1-11.

b. Pendidikan yang *humanistik*

Merupakan model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia [humanisasi], yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan *fitrahnya*. Maka manusia sebagai makhluk hidup, ia harus mampu melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya. Maka posisi pendidikan dapat membangun proses humanisasi, artinya menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan di perlakukan dengan adil, hak untuk menyuarahkan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya. Pendidikan humanistik, diharapkan dapat mengembalikan peran dan fungsi manusia yaitu mengembalikan manusia kepada *fitrahnya* sebagai sebaik-baik makhluk. Maka, manusia “yang manusiawi” yang dihasilkan oleh pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk manusia berpikir, berasa dan berkemauan serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat mengganti sifat individualistik, egoistik, egosentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat menghormati dan dihormati, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan, sifat menghargai hak-hak asasi manusia, sifat menghargai perbedaan dan sebagainya.

c. Pendidikan *pragmatik*

Pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik bersifat jasmani maupun rohani, seperti berpikir, merasa, aktualisasi diri, keadilan, dan kebutuhan spiritual *ilahiyyah*. Dengan demikian, model pendidikan dengan pendekatan pragmatik diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.

d. Pendidikan yang *berakar pada budaya*

Yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa, kelompok etnis, atau suatu masyarakat tertentu. Maka dengan model pendidikan yang

berakar pada budaya, diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri, dan membangun peradaban berdasarkan budaya sendiri yang akan menjadi warisan monumental dari nenek moyangnya dan bukan budaya bangsa lain.¹³ Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita menjadi orang yang anti kemodernan, perubahan, reformasi dan menolak begitu saja arus transformasi budaya dari luar tanpa melakukan seleksi dan alasan yang kuat. Selanjutnya, dari keempat model yang dikemukakan di atas, dapat ditarik lagi pada desain model pendidikan Islam yang lebih operasional, yaitu:

Pertama, mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Dengan demikian, visi, misi dan tujuan pendidikan, kurikulum dan materi pembelajaran, metode pembelajaran, manajemen pendidikan, organisasi dan sumber daya pendidikan [guru dan tenaga administrasi] harus disesuaikan dengan kebutuhan serta sesuai visi, misi dan tujuan pendidikan tersebut. Model pendidikan umum Islami, kurikulumnya bersifat integratif antara materi-materi pendidikan umum dan agama, sehingga mampu mempersiapkan intelektual Islam yang berfikir secara komprehensif. Atau meminjam istilah Fazlur Rahman, yaitu model pendidikan sekuler modern dan mengisinya dengan konsep-konsep Islam, untuk melahirkan intelektualisme muslim yang tangguh, walaupun Ahmad Syafii Maarif, menolak hal ini yaitu kita tidak perlu berteriak untuk mengislamkan ilmu modern.

Kedua, model pendidikan Islam yang tetap mengkhhususkan pada desain “pendidikan keagamaan” seperti sekarang ini. Artinya harus mendesain ulang model “pendidikan Islam” yang berkualitas dan bermutu, yaitu : [1] dengan merumuskan visi dan misi serta tujuan yang jelas, [2] kurikulum dan materi pembelajaran diorientasikan pada kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat untuk dapat menjawab tantangan perubahan, [3] metode pembelajaran diorientasikan pada upaya pemecahan kasus [problem solving] dan bukan dominasi ceramah, [4] manajemen pendidikan diorientasi pada

¹³ A. Malik Fadjar, 1999:37-39

manajemen berbasis sekolah, [5] organisasi dan sumber daya guru yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bidangnya masing-masing. Maka pendidikan Islam akan mampu bersaing dengan mampu mempersiapkan dan melahirkan mujtahid-mujtahid yang tangguh, berkualitas dan berkaliber dunia dalam bidangnya sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan aktual atau kontemporer sesuai dengan kebutuhan perubahan zaman. Desain model pendidikan seperti ini, harus secara “selektif menerima” pendidikan produk barat, berarti harus mendesain model pendidikan yang betul-betul sesuai dengan konsep dasar Islam dan sesuai dengan lingkungan sosialbudaya Indonesia. Kata Fazlur Rahman, apabila kita ingin membangun pendidikan Islam yang berkualitas, harus kembali kepada al-Qur’an dan Qur’an harus ditempatkan sebagai pusat intelektualisme Islam.

Ketiga, model pendidikan agama Islam tidak dilaksanakan disekolah-sekolah formal tetapi dilaksanakan di luar sekolah. Artinya pendidikan agama dilaksanakan di rumah atau lingkungan keluarga, mesjid dan lingkungan masyarakat [tempat-tempat pengajian dan Masjid] dalam bentuk kursus-kursus, kajian-kajian keagamaan, keterampilan beribadah dan sebagainya. Pendidikan agama akan menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat atau meminjam konsep Yahya Muhaimin yang dikemukakan terdahulu bahwa pendidikan berbasis keluarga [*familybased education*] dan pendidikan berbasis masyarakat [*community-based education*]. Pendidikan Islam, dapat ditanamkan dan disosialisasikan secara intensif melalui basis-basis tersebut, sehingga pendidikan agama sudah menjadi kebutuhan [*need*] dan based dalam pribadi peserta didik. Maka dalam proses belajar mengajar di sekolah pendidikan agama telah menjadi kebutuhan dan perilaku [*afektif* dan *psikomotorik*] yang aktual, bukan lagi berupa pengetahuan [*knowledge*] yang dihafal [*kognitif*] dan diujikan secara kognitif pula.

Keempat, desain model pendidikan diarahkan pada dua dimensi, yakni: [1] dimensi dialektika [horisontal], pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau

lingkungan sosialnya. Manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia sekitarnya melalui pengembangan Iptek, dan [2] dimensi ketundukan vertikal, pendidikan selain menjadi alat untuk memantapkan, memelihara sumber daya alam, juga menjembatani dalam memahami fenomena dan misteri kehidupan yang abadi dengan Maha Pencipta.¹⁴ Berarti pendidikan harus disertai dengan pendekatan hati, artinya pendidikan harus membangun hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan.

Keempat model pendidikan Islam yang dikemukakan di atas merupakan tawaran desain dan model pendidikan Islam yang perlu diupayakan untuk membangun paradigma pendidikan Islam yang lebih demokratis dalam menghadapi perkembangan perubahan zaman modern dan memasuki masyarakat madani Indonesia. Kecenderungan perkembangan semacam, dalam mengantisipasi perubahan zaman dan merupakan hal yang wajar-wajar saja. Sebab kondisi masyarakat sekarang ini bersifat praktis-pragmatis dalam hal aspirasi dan harapan terhadap pendidikan, sehingga pendidikan tidak statis atau hanya berjalan di tempat dalam menatap persoalan-persoalan yang dihadapi pada era masyarakat modern, post masyarakat modern dan masyarakat global.

Dengan demikian, apapun model pendidikan Islam yang ditawarkan pada dasarnya harus berfungsi untuk memberikan kaitan antara peserta didik dengan nilai-nilai *ilahiyyah*, pengetahuan dan keterampilan, nilai-nilai demokrasi, masyarakat dan lingkungan sosiokulturalnya yang terus berubah dengan cepat, sebab pada saat yang sama pendidikan secara sadar juga digunakan sebagai instrumen untuk perubahan dalam sistem politik, ekonomi secara keseluruhan.

SIMPULAN

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad saw telah mempraktikkan demokrasi Islam dalam berbagai segi kehidupan; seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan dengan

¹⁴ Sudiro, M. Irsyad. "Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern." *Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern, Cirebon, Tanggal*. Vol. 30. 1995.

menggunakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi seperti keadilan, kebebasan, persamaan, musyawarah, kerjasama, toleransi dan kemajemukan atau pluralitas. Semua nilai dan prinsip demokrasi juga terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi yang telah diimplementasikan kedalam kehidupan umat Islam sejak jaman Rasulullah saw hingga sekarang. Dalam demokrasi pendidikan, diterapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam pelaksanaan praktik dan program pendidikan suatu lembaga yang terdiri dari *stake holder* seperti pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, kepala institusi atau lembaga pendidikan dan masyarakat guna mencapai tujuan yang sama sebagaimana yang terdapat dalam visi dan misi lembaga pendidikan. Melalui upaya penerapan nilai demokrasi pendidikan diharapkan dapat mampu mendorong manusia untuk menjadi individu yang aktif, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, produktif dan menghargai orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Abrasy, M. A. (1996). Beberapa Pemikiran Pendidikan, Terjemah Syamsudin Asyrofi dkk.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Daulay, M. R. (2017). Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 3(1), 91-110.
- Dede, R. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana.
- Fadjar, A. M. (1999). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Fajar Dunia.
- Fuad, I. (2005). *Dasar-dasar kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah, H. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi*. Rajawali Pers.

- Madjid, N. (1993). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, cet. V. Bandung: Mizan.
- Nata, A. (2000). *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pendidikan, D. (1990). *Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Ramayulis. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia
- Romlah, S. (2018). Demokrasi Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*, 13(2), 1-11.
- Sudiro, M. I. (1995). Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern. In *Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern, Cirebon, Tanggal* (Vol. 30).